

**PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018
(STUDI KASUS PADA DESA BALONGMOJO KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK)**

Nama Mahasiswa : Nita Nur Septia
NIM : 1021910044
Pembimbing : Alfiana Fitri, S.A., M.A.

ABSTRAK

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada faktor penting yang membuat mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya peraturan yang terbaru ini, Pemerintah Desa yang masih baru dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa butuh pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan untuk menggunakan peraturan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Fokus dalam penelitian ini ialah Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Fokus dalam penelitian ini ialah Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Metode penelitian yang di gunakan adalah Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada desa Balongmojo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun untuk transparansi

pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Balongmojo belum dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.



**VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON MINISTER
OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 20 OF 2018
(CASE STUDY IN BALONGMOJO VILLAGE, BENJENG
DISTRICT, GRESIK DISTRICT)**

Student Name : Nita Nur Septia
Student Identity Number : 1021910044
Advisor : Alfiana Fitri, S.A., M.A.

ABSTRACT

Village administration is the implementation of government affairs and the interests of the local community in a unified system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. There are important factors that make the village financial management mechanism not work as it should, namely human resources that are still lacking and do not even understand the regulations regarding village financial management. With this latest regulation, Village Governments that are still new to implementing village financial management need learning through supervision and assistance to use regulations in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

The focus in this research is Village Fund Financial Management Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The focus in this research is Village Fund Financial Management Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The research method used is qualitative.

The results of this study indicate that financial and village management starting from planning, implementation, administration, reporting, accountability in Balongmojo village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, for transparency in the financial management of village funds in Balongmojo Village, it has not been communicated properly with the community.

Keywords : Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability.